



BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 adalah penjabaran dari perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018. Perencanaan tahun 2018 ini merupakan periode kelima dari pelaksanaan RPJMD tahun 2013-2018 dengan tema pembangunan, **"Penguatan Ekonomi Masyarakat Menuju Kesejahteraan yang Adil dan Merata"**. RKPD tahun 2018 merupakan langkah akhir menuju pencapaian pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018.

Tema pembangunan daerah tahun 2018 memiliki fokus terhadap pembangunan dan pengembangan ekonomi mikro dan makro dalam rangka menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Dalam proses pembangunan daerah kondisi ekonomi dan keuangan daerah merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, perlu dirumuskan perencanaan perekonomian dan keuangan daerah yang saling terintegrasi untuk mencapai optimalisasi penggunaan sumber daya dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Kebijakan perekonomian daerah sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah perlu didukung dengan pola penggunaan anggaran pembangunan. Dengan kata lain diperlukan optimalisasi penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dapat dijadikan dasar penentuan penyusunan kebijakan perekonomian dan keuangan daerah.

Sebagai salah satu daerah otonomi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur memiliki arahan kebijakan potensial dalam pembangunan daerah sebagai langkah peningkatan kemandirian Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut didasari oleh asas otonomi daerah sehingga melahirkan implikasi-implikasi

langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia, dan sumber daya alam. Selanjutnya, implikasi-implikasi tersebut merupakan sarana langsung Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Mengacu pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, prinsip desentralisasi fiskal adalah:

1. Desentralisasi fiskal harus memerhatikan dan merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
2. Pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas pemerintah daerah dengan memerhatikan stabilitas perekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara pusat dengan daerah dan antar daerah; dan
3. Perimbangan keuangan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Sehubungan dengan hal di atas, kegiatan pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kegiatan tersebut merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan suatu daerah secara menyeluruh.

Rancangan kerangka ekonomi makro daerah akan memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi daerah pada tahun sebelumnya dan memperkirakan kondisi ekonomi dalam melaksanakan pembangunan pada tahun 2018. Selain itu, pada rancangan ekonomi makro daerah juga memperkirakan kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan untuk mendukung pencapaian target kinerja pemerintah tahun 2018.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam merumuskan arah kebijakan perekonomian daerah, maka diperlukan analisis ekonomi makro baik tingkat nasional, regional dan provinsi sebagai dasar dalam

mengambil keputusan rancangan ekonomi makro daerah yang akan dicapai. Analisis ekonomi makro daerah dilakukan dengan cara menilai sejauh mana tingkat korelasi kondisi ekonomi makro daerah terhadap kondisi ekonomi makro nasional maupun regional. Analisa ekonomi makro daerah dilakukan dengan mempelajari semua indikator ekonomi makro daerah dan factor-faktor yang mempengaruhi.

Analisis ekonomi ini dilakukan dengan mengumpulkan semua data, informasi dan permasalahan yang menjadi faktor-faktor pembentuk capaian kinerja perekonomian daerah pada tahun sebelumnya dan perkiraan tahun berikutnya. Dari hasil analisis ekonomi makro daerah selanjutnya disusun arah kebijakan ekonomi yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan keuangan daerah.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan 2016 dan Perkiraan Tahun 2017

Salah satu indikator utama yang digunakan untuk melakukan analisis perekonomian daerah adalah dengan melakukan analisis terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Analisa perekonomian daerah dapat dilakukan dengan menganalisa dinamika dan struktur PDRB.

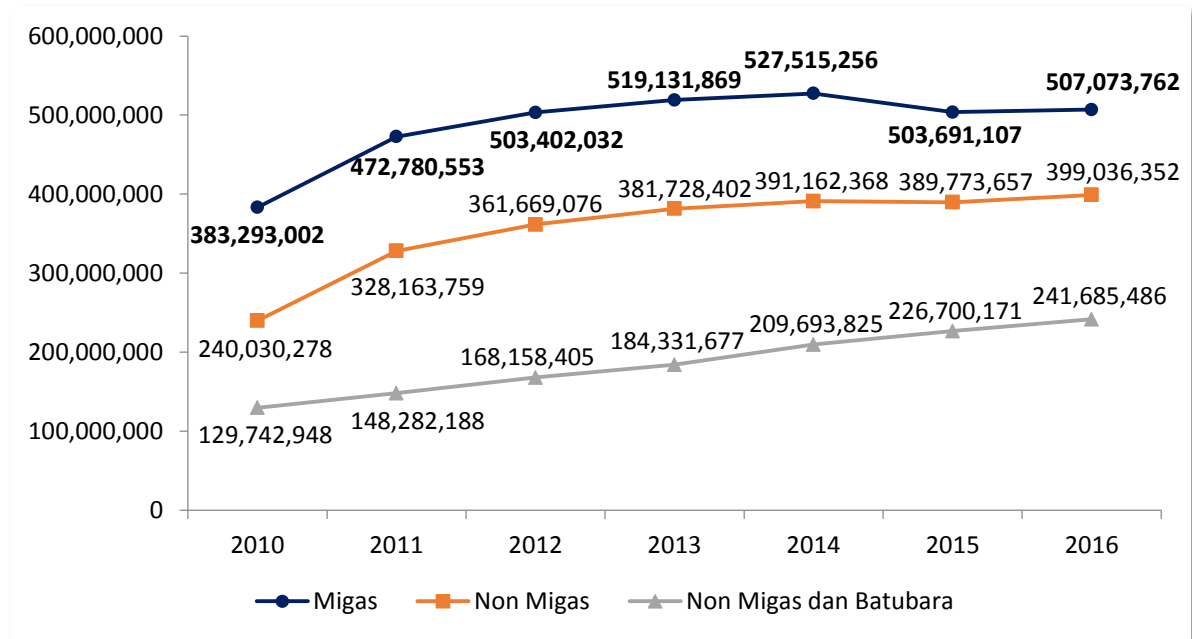
A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Provinsi Kalimantan Timur akan menggambarkan kemampuan, potensi ekonomi dan kinerja perekonomian daerah, baik dalam pengelolaan sumber daya manusia maupun sumber daya alam.

Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun 2010 hingga 2014 selalu mengalami peningkatan di setiap periodenya, puncaknya mencapai 527,52 triliun rupiah, namun pada tahun terakhir (tahun 2016), pergerakannya terlihat semakin melambat dan bahkan menurun dengan besaran nilainya menjadi 507,07 triliun rupiah. Penurunan nilai PDRB paling drastis terjadi pada migas, sedangkan nilai PDRB non migas dan batubara tetap meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Dari nilai PDRB tersebut, tampak jelas bahwa PDRB Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan yang terkait batubara dan migas. Tingginya dominasi sumber daya alam tak terbarui ini terhadap pembentukan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur akan menimbulkan gejolak perekonomian di

kemudian hari jika tidak ada pengelolaan perekonomian pembangunan secara berkelanjutan.

Gambar 3.1
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2016 (Juta Rupiah)

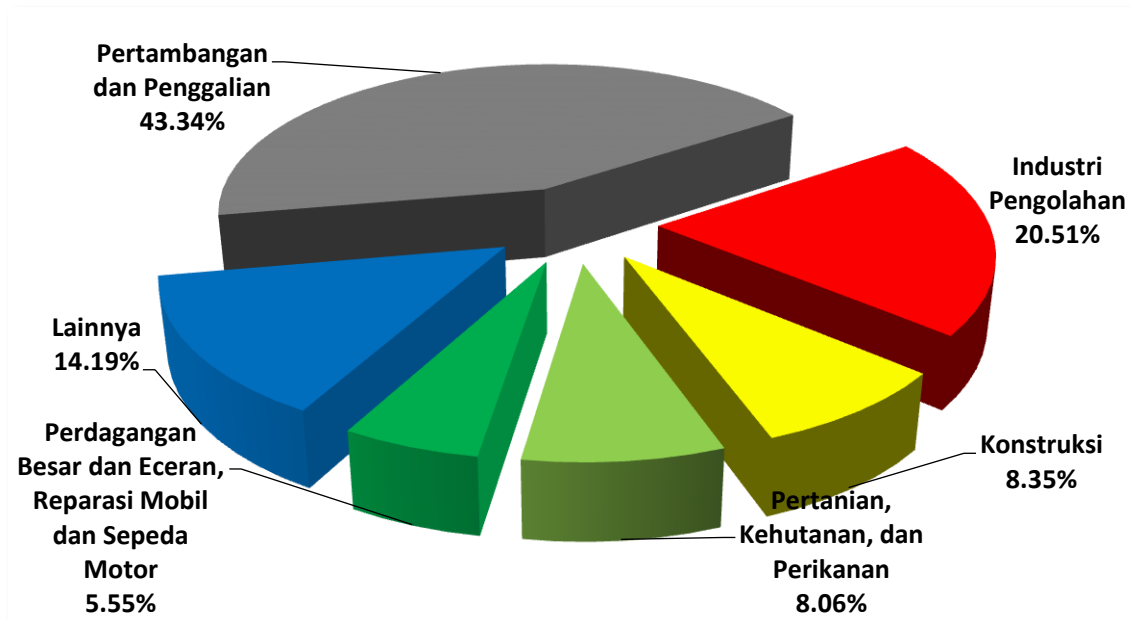


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

B. Struktur Ekonomi Daerah

Dominasi kategori pertambangan dan penggalian terhadap pembentukan perekonomian daerah mencapai 43,34 persen. Meskipun demikian, dominasi struktur ekonomi kategori pertambangan dan penggalian ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun dimana selain terlihat dari kontribusi sektor juga terlihat dari laju pertumbuhan sektoralnya yang mengalami perlambatan bahkan pertumbuhan negatif pada tahun 2016.

Gambar 3.2
Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 (Persen)



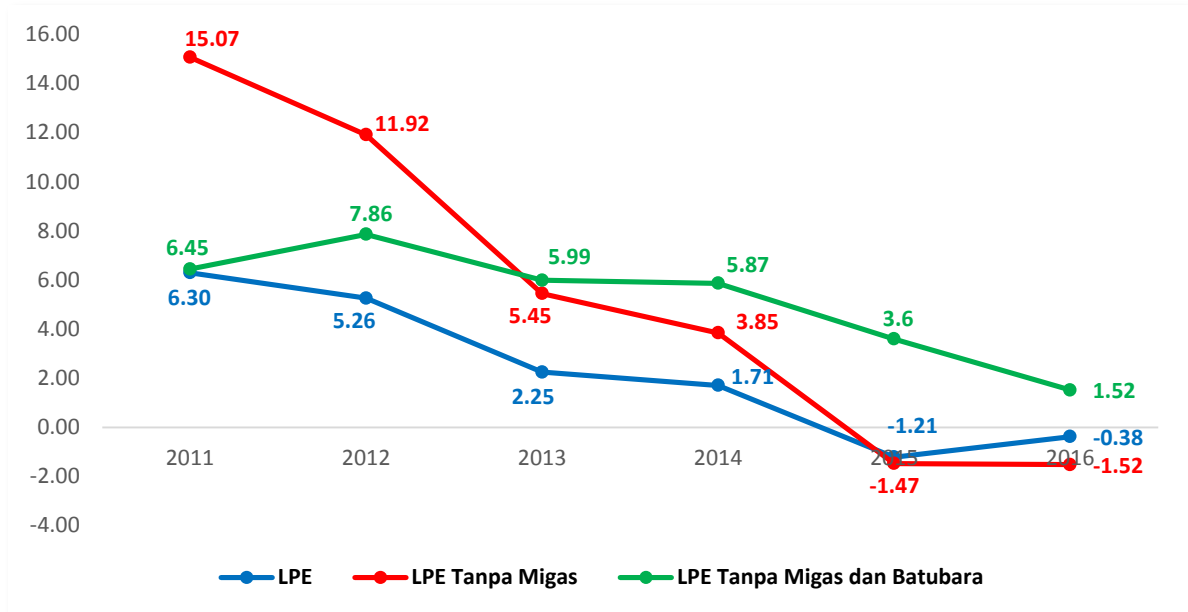
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

Hal menarik terkait perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur adalah bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur jauh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, namun kontribusi Provinsi Kalimantan Timur terhadap pendapatan nasional sangat tinggi. Hal ini dikarenakan tingginya kontribusi sektor migas dan batubara dalam pembentukan PDRB Provinsi Kalimantan Timur yang berdampak pada kontribusi PDRB nasional. Namun yang perlu digarisbawahi, meskipun PDRB masih tergolong tinggi, produksi minyak, gas, dan batubara terus menurun dari tahun ke tahun yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada menurunnya nilai tambah dan terhambatnya pertumbuhan ekonomi.

C. Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan daerah secara valid. Indikator ini dapat digunakan sebagai dasar dalam perumusan perencanaan pembangunan ke depannya karena indikator ini dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara periodik dari waktu ke waktu dan membantu dalam mengidentifikasi sektor lapangan usaha potensial yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi cukup tinggi.

Gambar 3.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2016 (Persen)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur mengalami perlambatan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi hanya sebesar -1,21 persen, melambat dari tahun sebelumnya yang mencapai 1,71 persen. Perlambatan ini sebagian besar dikarenakan terjadinya pertumbuhan negatif pada sektor yang memberikan kontribusi signifikan dalam struktur perekonomian daerah, yaitu kategori pertambangan dan penggalian (-3,52%). Hal ini terlihat pada laju pertumbuhan ekonomi jika dikeluarkan sektor yang terkait batubara dan migasnya mencapai 3,60 persen. Pada tahun 2016, ekonomi Provinsi Kalimantan Timur tumbuh negatif sebesar -0,38 persen sebagai akibat dari penurunan laju pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 43,34 persen, jauh di bawah pertumbuhan tahun 2015 sebesar 45,16 persen. Jika dilihat berdasarkan kategorinya, pertumbuhan ekonomi tertinggi berada pada kategori pengadaan listrik dan gas (21,24%) serta jasa pendidikan (12,23%).

Tabel 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2013-2016
(Persen)

Kategori	Lapangan Usaha	2013	2014 ^{*r}	2015 ^{*r}	2016
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,44	6,78	4,55	0,46
B	Pertambangan dan Penggalian	1,85	(0,40)	(4,89)	(3,52)
C	Industri Pengolahan	(1,81)	0,45	2,66	5,46
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,56	21,24	30,43	8,32
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,26	4,55	2,56	6,57
F	Konstruksi	4,91	6,33	(0,94)	(3,41)
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,26	5,13	1,42	2,75
H	Transportasi dan Pergudangan	6,51	7,26	2,76	3,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,34	5,65	5,33	3,67
J	Informasi dan Komunikasi	9,11	8,45	7,66	7,45
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	14,37	2,41	2,05	1,83
L	Real Estat	8,23	8,29	3,59	(0,83)
M,N	Jasa Perusahaan	8,22	8,29	(3,75)	(4,25)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,74	9,29	4,20	(3,05)
P	Jasa Pendidikan	18,74	12,23	9,88	7,33
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,12	9,03	10,53	9,31
R,S,T,U	Jasa Lainnya	3,24	7,38	8,81	9,65
Laju Pertumbuhan Ekonomi		2,25	1,71	(1,21)	(0,38)

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017-2018

Besaran laju pertumbuhan Kalimantan Timur pada tahun 2014 menurut tahun dasar 2010 kembali mengalami penurunan, yaitu dari 2,25 persen di tahun 2013 menjadi -0,38 persen di tahun 2016. Perlambatan ekonomi ini disebabkan oleh menurunnya kinerja sektor dominan dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur, yaitu sektor pertambangan dan penggalian. Menurunnya produksi beberapa barang tambang ini merupakan dampak dari perlambatan ekonomi Tiongkok yang menyebabkan

menurunnya permintaan batubara dari Provinsi Kalimantan Timur. Namun demikian, secara total pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2014 masih positif.

Tabel 3.2
Pertumbuhan ekonomi dan Inflasi Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator Ekonomi	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pertumbuhan ekonomi (% , yoy)	1,57	-1,28	1±1	1±1	0,5±1
2	Inflasi	7,4	4,9	4±1	4±1	4±1

Pertambangan migas juga mengalami penurunan *lifting* pada empat tahun terakhir, sehingga menyebabkan menurunnya kinerja industri pengolahan migas di Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2014, sektor pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan negatif. Hal ini didorong oleh kinerja positif sektor pertanian, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor perdagangan, sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor konstruksi. Sementara itu dari sisi permintaan, laju perekonomian Provinsi Kalimantan Timur didorong oleh kinerja pengeluaran konsumsi rumah tangga dan investasi.

Pada tahun 2016, perekonomian Kalimantan Timur mengalami pertumbuhan negatif -0,38 persen sebagai akibat adanya penurunan kinerja yang cukup signifikan pada sektor pertambangan dan penggalian hingga -3,52 persen. Selain itu, pada sektor konstruksi dan jasa perusahaan juga mengalami pertumbuhan negatif, masing-masing sebesar -3,41 persen dan -4,25 persen. Penurunan kinerja pada sektor konstruksi dan jasa perusahaan merupakan imbas dari penurunan produksi di sektor pertambangan dan penggalian. Di sisi lain, sektor-sektor ekonomi lainnya mengalami pertumbuhan positif, namun kinerja positif tersebut tidak mampu mengimbangi penurunan kinerja sektor pertambangan dan penggalian yang berpengaruh cukup signifikan.

I. Nilai PDRB dari Sisi Permintaan

Provinsi Kalimantan Timur merupakan wilayah yang perekonomiannya mengandalkan kinerja komoditas ekspor barang, terutama ekspor sektor primer, seperti: batubara, minyak bumi, dan gas alam. Barang-barang ekspor primer tersebut merupakan bagian dari sumber daya alam yang tak terbarui dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memproduksi kembali, oleh karena itu dalam

pemanfaatannya, Provinsi Kalimantan Timur harus memiliki kebijakan-kebijakan yang strategis untuk dapat melakukan restrukturisasi perekonomian wilayah dari dominasi sektor yang berbasis sumber daya tak terbarui menjadi ekonomi yang berbasis sektor dapat diperbaharui dan berkelanjutan.

Tabel 3.3
PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2013-2016 (Rp. Juta)

KATEGORI PENGGUNAAN	2013	2014	2015	2016
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	73,396,421.73	80,180,286.67	86.563.223,85	90.750.792,91
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,766,359.98	2,090,680.95	2,460,192.02	2.439.025,31
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	20,281,615.33	23,523,174.00	25.079.715,17	24.143.516
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	129,083,647.03	139,830,347.87	145.766.483,58	144.794.383,71
5. Perubahan Inventori	9,842,941.81	23.344.421,20	5.771.865,95	1.922.886,69
6. Ekspor Luar Negeri	371,841,805.18	350.299.171,85	256,979,357.18	197.483.434,72
7. Impor Luar Negeri	110,413,720.41	119,093,437.40	88,717,185.71	65.089.941,02
8. Net Ekspor Antardaerah	23,332,798.23	38.340.610,95	69.787.454,56	110.629.663,71
P D R B	519,131,868.87	527.515.256,10	503.691.106,60	507.073.762,02

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Dasar 2010 (Tanpa Kaltara)

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan PDRB menurut penggunaannya dapat dilihat dari beberapa kategori sebagaimana tampak pada tabel di atas. Dilihat dari kategori pengeluaran, pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp. 86,56 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp. 90,75 triliun pada tahun 2016. Demikian pula pengeluaran Konsumsi Pemerintah atas dasar harga berlaku, terjadi peningkatan Rp. 24,6 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp. 24,39 triliun pada tahun 2016. Besaran nilai investasi yang tunjukkan oleh nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Provinsi Kalimantan Timur hingga akhir tahun 2016 lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2016, nilai PMTB sebesar Rp. 144,79 triliun, sedangkan pada tahun 2015 sebesar Rp. 145,77 triliun.

Lebih lanjut, dilihat dari nilai ekspor dan impor, penurunan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016, terjadi akibat melambatnya kinerja ekspor luar negeri ke beberapa negara maju dan negara dengan pendapatan menengah yang juga tengah mengalami perlambatan ekonomi. Perlambatan ekonomi di negara-

negara tersebut terjadi akibat pelemahan harga dan permintaan komoditas dunia (terutama minyak), melemahnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok, serta melemahnya konsumsi domestik. Terjadinya ketidakstabilan ekonomi global di pasar internasional berdampak negatif terhadap perekonomian wilayah Indonesia. Meskipun demikian, perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masih memiliki catatan positif, yaitu terjadi surplus pada komponen net ekspor antardaerah sebanyak Rp 110,63 triliun. Nilai net ekspor tersebut lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp 69,79 triliun.

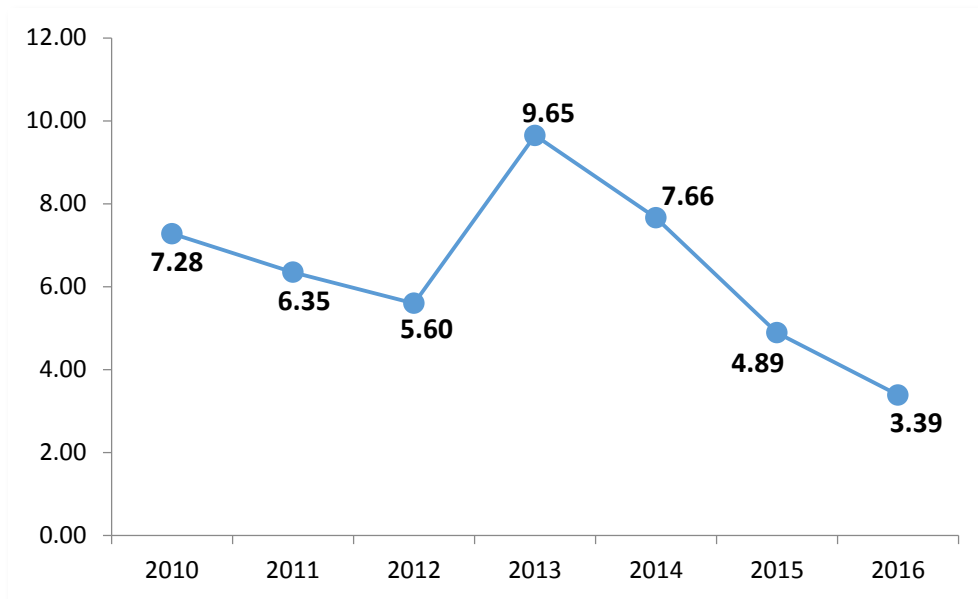
Pada tahun 2016, besaran nilai ekspor luar negeri turun dari Rp. 257 triliun menjadi sebesar Rp. 197,48 triliun. Demikian juga besaran nilai impor luar negeri dari sebesar Rp. 14,56 triliun pada tahun 2015, menjadi sebesar Rp. 65,09 triliun pada tahun 2016. Komoditas ekspor utama Provinsi Kalimantan Timur diantaranya adalah batubara, gas alam, minyak mentah, minyak kelapa sawit/CPO, dan pupuk. Sedangkan, komoditas impor masuk antara lain minyak mentah, mesin, peralatan dan barang konsumsi, serta barang modal.

II. Inflasi

Inflasi, dalam ilmu ekonomi, merupakan suatu proses menurunnya nilai mata uang disertai dengan peningkatan harga barang secara umum dan terus-menerus (*continue*). Inflasi merupakan proses dari suatu peristiwa dan bukan tergantung tinggi-rendahnya tingkat harga (artinya tingkat harga dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi). Dalam aplikasinya, inflasi dapat menjadi indikator langsung untuk melihat tingkat perubahan atau proses kenaikan/penurunan harga yang berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi.

Inflasi, terkait dengan mekanisme pasar, dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, serta akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Laju inflasi yang cukup fluktuatif dan tergolong tinggi dalam kegiatan perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.4
Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2016
(Persen)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

Laju inflasi Provinsi Kalimantan Timur cukup fluktuatif dari tahun ke tahun dimana paling tinggi terjadi pada tahun 2013 (9,65%) dan paling rendah di tahun 2016 (3,39%). Rendahnya laju inflasi pada tahun terakhir ini dipicu oleh beberapa faktor yang menyebabkan kelesuan perekonomian daerah, yaitu: terhambatnya distribusi berbagai komoditas barang dan jasa; kelangkaan beberapa komoditas, baik karena aksi spekulan/penimbun barang maupun keterbatasan produksi komoditas tersebut; hingga kebijakan perekonomian nasional yang berdampak pada perekonomian regional.

Laju inflasi di Provinsi Kalimantan Timur dibentuk oleh dua kota Indeks Harga Konsumen (IHK), yaitu Kota Samarinda dan Kota Balikpapan (angka yang dihasilkan masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Utara). Berikut inflasi di setiap kota IHK di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Tabel 3.4
Laju Inflasi Menurut Kota IHK Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2010-2016
(Persen)

Tahun	Samarinda	Balikpapan	Kalimantan Timur	Nasional
2010	7,00	7,38	7,28	6,96
2011	6,23	6,45	6,35	3,79

Tahun	Samarinda	Balikpapan	Kalimantan Timur	Nasional
2012	4,81	6,41	5,60	4,30
2013	10,37	8,56	9,65	8,38
2014	6,74	7,43	7,66	8,36
2015	4,24	6,26	4,89	3,35
2016	2,83	4,13	3,39	3,02

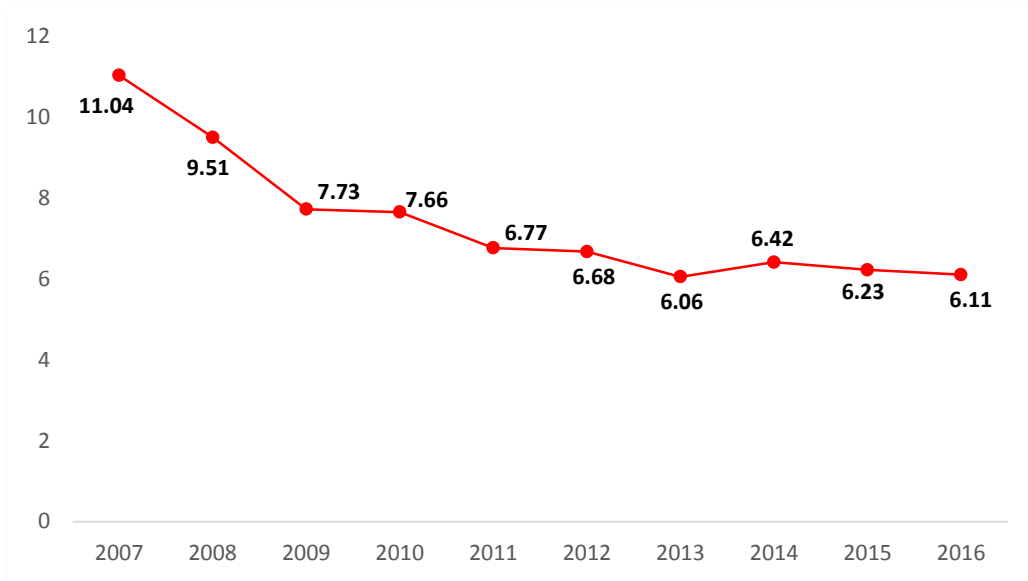
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

III. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan juga merupakan sebuah permasalahan klasik dan kontinyu yang selalu ada dan berkembang di suatu wilayah. Oleh karena itu, tugas utama pemerintah terkait kemiskinan adalah berusaha meminimalisir dan memberdayakan masyarakat sehingga memiliki daya saing dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Indikator yang sangat nyata dalam melihat kemiskinan di suatu wilayah adalah tingkat kemiskinan, yang menyatakan persentase penduduk miskin terhadap keseluruhan penduduk di wilayah tersebut.

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur memiliki kecenderungan menurun pada setiap periode pembangunan hingga mencapai angka 6,11 persen pada tahun 2016. Meskipun memiliki kecenderungan menurun, tingkat kemiskinan mulai mengalami kerentanan dalam penurunannya, bahkan mengalami kenaikan pada tahun 2014 jika dibandingkan dengan tahun 2013.

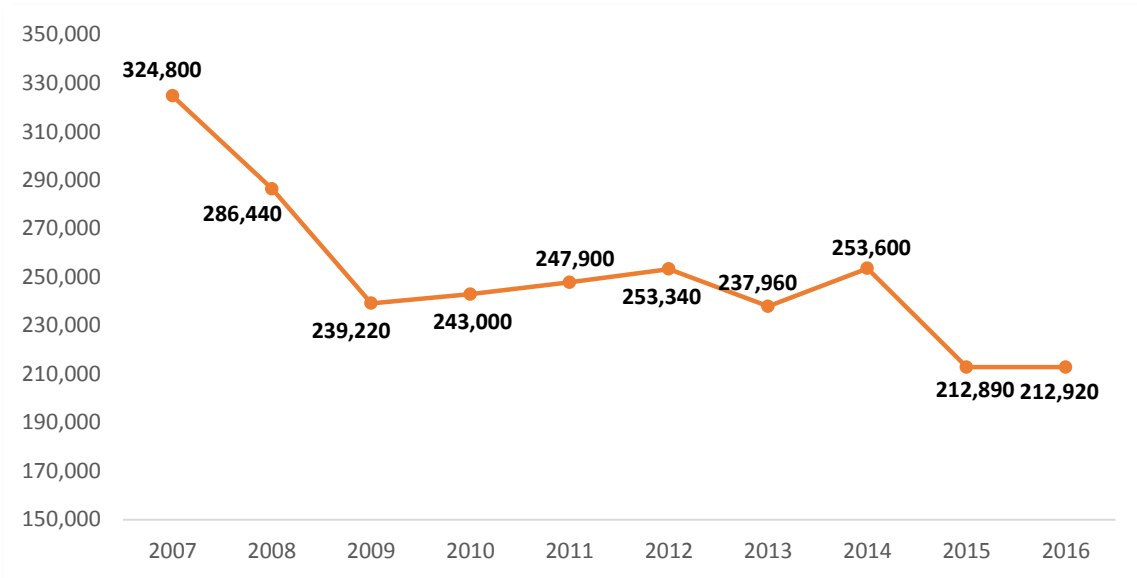
Gambar 3.5
Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2008-2016
(Persen)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

Lain halnya jika dilihat secara absolut, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur memiliki *trend* yang fluktuatif dalam perkembangannya. Pada tahun 2016, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 212.920 jiwa, artinya secara absolut jumlah penduduk miskin juga turun jika dibanding pada tahun sebelumnya (212.890 jiwa penduduk miskin). Penurunan tingkat kemiskinan maupun jumlah penduduk miskin ini merupakan capaian positif pemerintah daerah, meskipun begitu perlu menjadi perhatian oleh pemerintah provinsi sebagai pengayom masyarakat agar selalu memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan setiap realisasinya berjalan seiring dengan program dari pemerintah pusat.

Gambar 3.6
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2008-2016
(Jiwa)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

Perekonomian Kalimantan Timur sangat dipengaruhi oleh adanya tren penurunan harga dan permintaan komoditas global sektor mineral dan tambang yang berlangsung sepanjang tahun 2016. Akibatnya, sulit bagi perekonomian Kalimantan Timur untuk melakukan ekspansi usaha pada sektor tersebut dan pada akhirnya, karena adanya dominasi signifikan dari sektor pertambangan dan pergalian terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Timur, sangat besar kemungkinan terjadi perlambatan atau pertumbuhan negatif pada perekonomian Kalimantan Timur secara total.

Tabel 3.5
Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2011-2016

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Ket.
1.	Jumlah Penduduk	Jiwa	3.131.964	3.199.696	3.275.844	3.351.432	3.426.638	3.501.232	Penduduk proyeksi
2.	Pertumbuhan Ekonomi (Th.Dasar 2010)	%	6.30	5.26	2.25	1.71	(1.21)	(0,38)	



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Ket.
3.	Laju Inflasi	%	6.35	5.60	9.65	7.66	4.89	3,39	Gabungan Kaltara
4.	Pendapatan per Kapita (Th. Dasar 2000)	Juta Rp	58,96	63,74	64,12	61,17	50,63	50,27	Angka Masih dalam Proses
5	Persentase penduduk miskin (Kondisi Maret)	%	6,77	6,68	6,06	6,42	6,23	6,11	
6.	Rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita	Rp/Bulan	871.251	986.563	1.096.709	1.136.173	1.193.642		
6.1	Rata-rata pengeluaran konsumsi makanan per kapita	Rp/Bulan	403.719	450.920	508.706	508.801	549.351		
6.2	Rata-rata pengeluaran konsumsi non makanan per kapita	Rp/Bulan	467.532	535.643	588.003	627.372	644.291		
7.	PDRB per kapita (Th.Dasar 2010)	Juta Rp	151,37	157,33	158,35	155,14	143,25		Tahun dasar 2010
8.	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	Milliar Rp & Ribu US\$	16.196.33 & 1.348.060,8	7.709.27 & 2.529.900,00	18.441.37 & 1.324.197,42	12.983.04 & 2.145.665,10	9.611.31 & 2.381.442,30	6.885.124,60 & 1.181.859,20	

Turunnya level permintaan Tiongkok masih menjadi isu terdepan dalam bisnis batubara, khususnya untuk regional Asia. Sebagai importer dan konsumen batubara terbesar di dunia, permintaan Tiongkok memainkan peranan penting dalam pembentukan harga batubara. Pemerintah Tiongkok bahkan memberlakukan kebijakan pemotongan angka produksi sebesar 150 juta ton dan impor sejumlah 50 juta ton dalam menyikapi rendahnya harga di level domestik. Selain kebijakan tersebut efektif per 15 Oktober 2014, Pemerintah Tiongkok juga mulai memberlakukan pajak impor bagi batubara untuk memproduksi penambangan lokal. Perlambatan ekonomi yang terjadi

di Tiongkok menjadi penyebab utama tertahannya produksi batubara Kalimantan Timur.

Senada dengan Tiongkok, sentiment negatif juga masih terjadi pada pasar batubara Kalimantan Timur dengan tujuan Korea Selatan. Dalam menyikapi penerapan pajak impor baru, yaitu US\$ 16,2/ton untuk kalori kurang dari 5.000 kc dan US\$18,2 untuk kalori yang lebih dari 5.000 kc, importir Korea mulai mengalihkan review atas pajak tersebut, khususnya untuk batubara dengan kalori yang banyak dikonsumsi, yakni 3.800 kc NAR. Importir mengusulkan agar khusus untuk kalori tersebut pajaknya ditambah menjadi US\$ 14,2/ton namun tampaknya review ini tidak ditanggapi oleh pemerintah. Perkembangan ekspor batubara Kalimantan Timur masih dapat terbantu dengan peningkatan batubara di India, meskipun relatif masih terbatas.

Dari sisi migas, berdasarkan hasil liaison diindikasikan bahwa sampai dengan awal 2015 penurunan *lifting* diperkirakan masih akan terus terjadi. Penurunan ini merupakan dampak belum adanya kepastian perpanjangan salah satu blok migas. Sentimen positif yang menjadi pendukung sedikit tertahannya kontraksi di sektor pertambangan migas, terutama karena mulai berproduksinya beberapa proyek migas dengan total produksi sekitar 615 mmscfd.

Dari sisi fiskal, penurunan harga minyak dan batubara di pasar Internasional juga berpotensi menurunkan Dana Bagi Hasil (DHB) yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya DBH Sumber Daya Alam. Penurunan kapasitas fiskal tersebut menjadi faktor yang menghambat pemerintah dalam mempercepat infrastruktur di Kalimantan Timur.

Penurunan yang diperkirakan terjadi di sektor pertambangan dapat ditahan atau paling tidak diminimalisir dampaknya terhadap ekonomi secara keseluruhan melalui upaya perbaikan pada sektor-sektor diluar sektor berbasis SDA. Indikator pertumbuhan ekonomi Non Migas dan Batubara menunjukkan angka positif (1,52 persen) di tahun 2016, hal ini menunjukkan bahwa terdapat peluang peningkatan kinerja ekonomi melalui percepatan kinerja pada sektor berbasis non SDA. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendorong peningkatan kinerja sektor berbasis non SDA dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur secara keseluruhan.

Peningkatan kinerja sektor pertanian dilakukan dengan adanya program penguatan ketahanan pangan, pembangunan proyek infrastruktur strategis, dan berkembangnya industri pengolahan nonmigas. Perekonomian Kalimantan Timur juga akan didorong oleh sektor pengadaan listrik yang diperkirakan terus meningkat dalam dua tahun ke depan seiring dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam rencana usaha dan bisnis PT PLN melalui pembangunan berbagai pembangkit listrik. Dari sisi fiskal, meskipun dana transfer pusat mengalami penurunan, namun proporsi pendapatan asli daerah justru semakin meningkat.

Dari sisi harga pergerakan inflasi Kalimantan Timur 2016 diperkirakan masih mendapatkan tekanan, baik dari sisi kebijakan pemerintahan maupun dari faktor non-fundamental seperti gangguan cuaca yang menyebabkan gangguan pada stok pangan dan distribusi, mengingat Kalimantan Timur masih bergantung dari daerah lain. Resiko inflasi yang disebabkan oleh pangan masih cukup tinggi mengingat prognosa produksi pertanian di Kalimantan Timur masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan di Kalimantan Timur. Ketergantungan pada daerah lain masih menjadi andalan di tengah resiko cuaca ekstrim dan naik turunnya gelombang laut untuk mendukung kelancaran distribusi. Optimalisasi utilitas pelabuhan menjadi faktor kunci dalam menjaga kelancaran distribusi yang merupakan faktor penting dalam pengendalian inflasi. Selain bahan makanan, konsumsi *durable goods* masyarakat diperkirakan akan mengalami kenaikan di akhir tahun sesuai dengan pola historis dimana konsumsi barang tahan lama cenderung meningkat di akhir tahun. Program pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan dan mendorong terwujudnya swasembada pangan, serta meningkatnya *awareness* pemerintah dan masyarakat terhadap pentingnya inflasi akan menjaga stabilitas inflasi di Kalimantan Timur.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan daerah pada periode-periode sebelumnya merupakan gambaran bagaimana pemerintah daerah merealisasikan pembangunan daerah dengan kemampuan pendanaan yang ada. Salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah adalah dengan melihat derajat otonomi fiskal yang dihitung melalui



ukuran kontribusi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Perangkat Daerah (PD) merupakan satuan entitas akuntansi dalam pemerintahan daerah sehingga memiliki tanggung jawab terhadap anggarannya masing-masing termasuk dalam pencatatan akuntansi. Realisasi dari penggunaan anggaran tersebut disusun dalam Laporan Realisasi Anggaran yang harus dilaporkan secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yaitu Biro Keuangan Sekda Prov Kaltim dan secara administratif harus dilaporkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD), yaitu Pejabat Pengguna Anggaran masing-masing PD.

Dari segi pengawasan terhadap rangkaian pengelolaan keuangan daerah periode tahun-tahun sebelumnya, disusunlah laporan keuangan oleh Biro Keuangan sebagai entitas pelaporan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan inilah yang kemudian akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dimana pengelolaan keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh setiap PD dan dikoordinir oleh Biro Keuangan.

Pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, laporan semester, laporan prognosis realisasi anggaran, laporan realisasi anggaran, neraca, hingga catatan atas laporan keuangan disusun secara otonomi oleh PD sebagai entitas akuntansi yang kemudian diverifikasi dan dikompilasi oleh Biro Keuangan sebagai entitas pelaporan menjadi Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur. Sementara itu, Laporan Arus Kas disusun secara sentralistik oleh Biro Keuangan.

Dalam hal pelaporan dan pengawasan Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun 2013 dapat dikatakan telah berhasil dengan hasil opini audit BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur berupa “Wajar Tanpa Pengecualian”. Namun pada tahun 2014, opini BPK tersebut menurun kategorinya menjadi “Wajar Dengan Pengecualian” yang mengindikasikan terjadinya penurunan

performa pelaporan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur. Penurunan hasil opini BPK terhadap laporan keuangan daerah perlu menjadi perhatian penting mengingat fokus utama reformasi birokrasi salah satunya adalah tertib administrasi yang mengindikasikan meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah.

3.2.1.1 Pendapatan Daerah

Gambaran mengenai perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu tahun 2013-2016 dapat dilihat pada Tabel 3.10, dimana analisis terhadap perkembangan pendapatan daerah secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut.

Meskipun rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah mencapai -12,36 persen. Penurunan ini dipicu oleh menurunnya hampir seluruh unsur-unsur pendapatan daerah, kecuali lain-lain pendapatan yang sah, DAK dan pendapatan hibah dari kelompok masyarakat yang peningkatannya tidak signifikan. Sebagian besar pendapatan daerah berasal dari pajak daerah dan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak terutama dari sektor pertambangan dan penggalian yang memiliki sumbangan perekonomian terbesar di Kalimantan Timur.

Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) menurun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -11,09%. Secara umum, selama kurun waktu empat tahun terakhir, unsur-unsur PAD menunjukkan penurunan yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mulai tahun 2014 tumbuh sebesar 13,24%, tahun 2015 turun sebesar 25,72%, dan tahun 2016 turun sebesar 20,78% sehingga rata-rata pertumbuhan PAD berada pada kisaran -11,09%. Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat berada pada tingkat sedang.

Realisasi penerimaan dana perimbangan pun terus mengalami penurunan selama kurun waktu empat tahun terakhir dengan rata-rata penurunan sebesar 10,31 persen. Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak yang juga turun sebesar 19,59%.

Secara totalitas realisasi anggaran dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah rata-rata pertumbuhannya juga turun sebesar 23,82 persen.

Tabel. 3.6
Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2013-2016

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016*	Rata – Rata Pertumbuhan
I	Pendapatan Daerah	11.631.697.051.829	11.287.300.941.021	8.999.519.970.923	7.762.674.455.112	-12,36%
1.	Pendapatan Asli Daerah	5.885.262.003.582	6.664.586.023.490	4.484.753.878.953	3.921.364.868.077	-11,09%
1.1	Pajak Daerah	4.929.791.598.766	5.429.125.998.687	3.753.718.935.815	2.942.500.000.000	-14,11%
1.2	Retribusi Daerah	33.676.707.132	15.494.252.850	14.722.788.428	16.454.410.000	-15,74%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	291.684.072.009	310.199.925.478	230.816.057.794	168.328.483.077	-15,74%
1.4	Lain-lain PAD yang sah	630.109.625.673	909.765.846.475	485.496.096.914	794.081.975.000	10,81%
2	Dana Perimbangan	5.335.759.149.747	4.253.320.982.625	4.024.025.055.410	3.813.127.539.436	-10,31%
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan pajak	5.272.171.973.247	4.194.970.542.625	3.805.373.705.410	2.700.200.757.204	-19,59%
2.2	DAU	55.539.336.500	57.312.515.000	-	65.298.295.232	-
2.3	DAK	8.047.840.000	1.037.925.000	218.651.350.000	1.960.318.081.537	7.086%
2.4	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-
2.5	Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	-
3	Lain-Lain PAD yang sah	410.675.898.500	369.393.934.905	490.741.036.560	28.182.047.600	-23,82%
3.1	Pendapatan Hibah	16.045.173.000	16.781.978.000	11.404.893.000	23.182.047.600	25,27%
3.2	Dana Penyesuaian	394.630.725.500	352.611.956.905	479.336.143.560	5.000.000.000	-24,56%

Sumber : data diolah

3.2.1.2 Belanja Daerah

Analisis belanja dilakukan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana untuk belanja daerah. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan

kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Proporsi realisasi penggunaan belanja daerah dapat dilihat pada Tabel 3.11 berikut:

Tabel 3.7
Penggunaan Anggaran Belanja Daerah

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016*	Rata – Rata Pertumbuhan
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.103.434.643.017	6.414.604.671.509	5.734.343.715.948	4.197.167.944.504	-15,70%
5.1.1	Belanja Pegawai	779.583.156.002	930.549.932.815	942.463.194.421	991.505.508.004	8,62%
5.1.4	Belanja Hibah	1.567.763.966.225	909.317.897.000	966.801.166.000	849.120.600.000	-15,95%
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.940.000.000	4.249.500.000	4.410.500.000	3.870.100.000	-0,20%
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.692.808.046.400	2.563.201.309.381	2.440.676.447.219	1.478.522.500.000	-16,34%
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	2.059.339.474.390	2.005.786.032.312	1.376.558.162.630	848.149.236.500	-24,12%
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	1.500.000.000	3.434.245.678	13.000.000.000	-
5.2	BELANJA LANGSUNG	6.676.810.264.458	4.860.027.165.524	3.964.706.259.506	3.792.191.055.496	-16,80%
5.2.1	Belanja Pegawai	568.035.668.614	494.596.159.995	281.455.610.472	341.297.194.995	-13,92%
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.457.692.779.178	2.154.150.620.058	1.688.776.168.500	1.592.720.243.308	-13,40%
5.2.3	Belanja Modal	3.651.081.816.665	2.211.280.385.471	1.994.474.480.532	1.858.173.617.193	-18,70%
Jumlah Belanja		13.780.244.907.476	11.274.631.837.034	9.699.049.975.455	7.989.359.000.000	-16,46%
Proporsi Belanja Tidak Langsung (%)		51,55	56,89	59,12	52,53%	
Proporsi Belanja Langsung (%)		48,45	43,11	40,88	43,81%	

Secara umum, realisasi belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu empat tahun terakhir mengalami penurunan/efisiensi. Sebagian besar realisasi belanja digunakan untuk belanja tidak langsung mencapai 52,53 persen pada tahun 2016 yang artinya semakin besarnya porsi penggunaan anggaran pembangunan untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat daerah.

Secara umum, rata-rata penurunan realisasi belanja tidak langsung mencapai 15,70 persen selama empat tahun terakhir dan penurunan belanja langsung rata-rata 16,34%. Analisis terhadap realisasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dikaji dari informasi pada Tabel 3.12 berikut:

Tabel 3.8
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

No	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
2	2012	1.514.854	11.339.765	13,36%
3	2013	1.696.672	12.900.000	13,15%
4	2014	1.587.234	12.217.683	12,99%
5	2015	1.223.918	9.699.058	12,19%
6	2016			

Dari Tabel 3.12 diatas dapat dilihat persentase proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 20,31 persen hingga 12,79 persen pada tahun terakhir. Selain disebabkan total pengeluaran pemerintah yang meningkat tajam, penurunan ini disebabkan pula karena upaya pemerintah untuk lebih memprioritaskan belanja publik guna memenuhi sarana dan parasarana dasar kebutuhan masyarakat.

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah, seperti: gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah, yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti: honorarium guru, tenaga medis, dan belanja sejenis lainnya.

Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan. Informasi realisasi pengeluaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dimaksud dapat dilihat pada Tabel 3.13. Analisis terhadap realisasi pengeluaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama selama tahun 2010-2014 (data tahun 2014 merupakan target belanja) dapat dijelaskan antara lain:

- Pertumbuhan rata-rata total realisasi pengeluaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama periode tahun 2010-2014 adalah sebesar 30,1 persen. Kenaikan ini dikarenakan belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk pengeluaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama cenderung meningkat.
- Pertumbuhan rata-rata total belanja tidak langsung adalah sebesar 30,6 persen. Dalam pengecekannya, perhitungan kenaikan ini disebabkan oleh adanya kecenderungan meningkatnya semua unsur belanja tidak langsung, terlebih lagi meningkatnya unsur belanja bagi hasil yang dominan, baik dari sisi jumlah dana maupun persentase.
- Pertumbuhan rata-rata total belanja langsung adalah sebesar 14,4 persen yang disebabkan karena semua unsur belanja langsung cenderung meningkat.

Tabel 3.9
Realisasi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Provinsi Kalimantan Timur (Juta Rupiah)

NO	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	RATA-RATA
A.	Belanja Tidak Langsung	2.782.161	3.063.571	3,807,431			
1	Gaji dan Tunjangan	345.849	465.048	467,878	414.013		
2	Tambahan Penghasilan PNS	290.737	323.347	354,834	421.576		
3	Belanja Penerimaan	12.740	13.621	15,268	13.482		



NO	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	RATA- RATA
	lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH						
4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Prov. upaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.132.835	2.261.555	2,779,451	2.440.67 6		
B.	Belanja Langsung	50.749	48.227	48,227			
5	Belanja honorarium PNS khusus Guru dan Tenaga Medis		-	-			
6	Belanja Beasiswa tugas belajar PNS	35.818	28.695	37,765	18.040		
7	Belanja Jasa Kantor	14.931	19.532	23,914	312.939		
	- Belanja Air	5.283	4.645	4,914			
	- Belanja Listrik	4.445	5.302	6,281			
	- Belanja Surat Prov.ar / Majalah	3.145	3.485	4,336			
	- Belanja Kawat / Faksimili/ Internet	2.059	6.100	14,105			
	- Belanja Sewa Gedung	-	-		12.935		
8	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	-	-		10.574		

NO	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	RATA-RATA
C.	Pembiayaan pengeluaran				50.000		
9	Pembentukan Dana Cadangan	-	-				
10	Pembayaran Pokok Utang	-	-				
Total		2.847.842	3.131.330				

3.2.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Berikut dapat dilihat perkembangan defisit anggaran.

Tabel 3.10
Defisit Riil Anggaran Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2012-2016
(Juta Rupiah)

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata
1.	Pendapatan	11.904.245	11.631.697	11.287.300	8.999.519		(0,04%)
Dikurangi Realisasi							
2.	Belanja Daerah	11.339.765	13.780.244	11.274.631	9.699.049		8,28%
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	202.800	-	25.000	50.000		(426.66%)
Defisit Riil (Realisasi)		361.6801	(2.148.547)	(12.330)	(749.530)		1.361,77%

Dari data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa komposisi penutup defisit anggaran belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur seluruhnya ditutup dari Sumber Pembiayaan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran tahun sebelumnya. SILPA adalah sisa anggaran tahun lalu yang ada dalam APBD tahun anggaran berjalan/berkenaan. SILPA

merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya.

Tabel 3.11
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Kalimantan Timur

NO	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumbuhan
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	3.198.903	1.050.356	1.038.125	287.098		(13,94)%
1.	Pelampauan Penerimaan PAD	-	-	-			
2.	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	-	-	-			
3.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	-	-			
4.	Sisa penghematan Belanja atau akibat lainnya	3.198.903	1.050.356	1.038.125	287.098		
5.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-			

Sumber : Data Diolah

3.2.2. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pendanaan program dan kegiatan selama pelaksanaan pembangunan daerah periode tahun 2018 sangatlah penting untuk dikaji. Dari dasar analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya (2012-2016), dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program dan kegiatan pada periode pembangunan tahun 2018.

Dilihat dari sisi pendapatan, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu. Salah satu indikator keuangan daerah tersebut adalah daya pajak (*tax effort*), yaitu perbandingan PAD terhadap kapasitas PAD. Kapasitas PAD sama dengan potensi PAD, yaitu pendapatan yang diterima apabila seluruh potensi digunakan secara optimal, dalam hal ini secara umum menggunakan nilai PDRB.

3.2.2.1 Proyeksi Pendapatan

Analisis terhadap pendapatan daerah dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

1. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu;
2. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan lain-lain);
3. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
4. Kebijakan di bidang keuangan negara.

Pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Artinya, perlu dilakukan peningkatan dan perluasan basis PAD dan mengupayakan secara optimal dana perimbangan, agar bagian daerah dapat diperoleh secara proporsional. Untuk itu, ditempuh berbagai upaya seperti peningkatan pengawasan, koordinasi, dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan.

Pendapatan Daerah dibagi menurut kelompok pendapatan yang meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD.

Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Bagi Hasil Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan, sedangkan Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Tabel 3.12
Proyeksi Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2017-2018

Uraian	Target	
	APBD Tahun 2017	Rencana Tahun 2018
PENDAPATAN	8,098,899,980,000	6,756,670,773,481
A. PENDAPATAN ASLI DAERAH	3,987,452,610,000	4,107,585,816,481
I. Pajak Daerah	3,034,590,000,000	3,110,000,000,000
II. Retribusi Daerah	23,133,125,000	25,838,100,000
III. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	161,561,830,000	172,348,061,481
IV. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	768,167,655,000	799,399,655,000
B. DANA PERIMBANGAN	4,092,045,370,000	2,637,101,957,000
I. Bagi Hasil Pajak	762,711,562,000	683,000,000,000
II. Bagi Hasil Bukan Pajak	1,545,912,562,000	1,312,000,000,000
III. Dana Perimbangan Lainnya	1,783,421,246,000	642,101,957,000
a. Dana Alokasi Umum	649,653,899,000	642,101,957,000
b. Dana Alokasi Khusus	1,133,767,347,000	
C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	19,402,000,000	11,983,000,000
I. Pendapatan Hibah	11,902,000,000	11,983,000,000
II. Dana Penyesuaian Otonomi khusus	7,500,000,000	

3.2.2.2 Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat

Tabel 3.13
Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2017-2018

No	Uraian	APBD TA. 2017	Rencana TA. 2018
A	Belanja Tidak Langsung	3,487,018,532,451	4,480,781,641,954
1	Gaji dan Tunjangan	1,830,002,532,451	2,008,578,641,954
2	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Provupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1,583,213,000,000	1,630,400,000,000
3	Belanja Hibah dan Bansos wajib	37,250,000,000	436,250,000,000



No	Uraian	APBD TA. 2017	Rencana TA. 2018
4	Belanja bantuan keuangan Prov/kab/kota dan Pemdes	1,553,000,000	1,553,000,000
5	Pilkada	20,000,000,000	399,000,000,000
6	Belanja Tidak Terduga	15,000,000,000	5,000,000,000
B	Belanja Langsung	1,393,546,394,175	2,450,395,241,030
1	Belanja MYC	695,846,394,175	1,570,015,241,030
	a) Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda	297,335,033,234	727,946,410,516
	b) Pembangunan Bandara Samarinda Baru	256,087,515,833	109,029,690,850
	c) Pembangunan Jembatan Mahakam 4	43,417,964,000	125,391,838,460
	d) Pembangunan Jalan mendekat Perekat Jembatan	34,300,542,287	393,466,415,730
	e) Pembangunan SPAM Maloy	30,978,515,720	120,163,363,000
	f) Pembangunan Pipa transmisi Sekerat Maloy	33,726,823,101	95,210,622,474
2	Belanja BLUD	697,700,000,000	715,380,000,000
	a) RSUD AWS Samarinda	470,200,000,000	484,380,000,000
	b) RSUD Kanujoso Djatiwibowo	204,000,000,000	204,000,000,000
	c) UPTD LabKes Dinkes	3,500,000,000	4,000,000,000
	d) RSJD Atma Husada	20,000,000,000	23,000,000,000
3	Dana Reboisasi dan Pendampingan, dana oprasional Retribusi		165,000,000,000
C	Pembiayaan pengeluaran	-	
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	
2	Pembayaran Pokok Utang	-	
3	Kewajiban Pinjaman Daerah	-	
Total		5,216,312,310,945	6,532,176,882,984

Sumber : data diolah

3.2.2.3 Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan

Rencana pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2018 dilakukan dengan mengacu pada potensi dan obyek pendapatan, baik yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Perencanaan tersebut merupakan perkiraan yang terukur secara rasional serta memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaannya. Pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur pada anggaran pendapatan tahun 2018 sangat bergantung dengan kondisi perekonomian

Nasional, daerah, regional maupun lokal, serta ekonomi global yang saat ini sedang terjadi keguncangan perekonomian dan cukup berefek pada skala internasional.

Dalam jangka panjang, pembangunan Kalimantan Timur berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan dari dana perimbangan, terutama yang bersumber dari Bagi Hasil Bukan Pajak yang diperoleh dari bagi hasil minyak dan gas alam dan royalti dari sektor pertambangan umum, sedangkan Pendapatan Asli Daerah mengandalkan pada Pajak Daerah, terutama melalui kebijakan pengembangan lapangan usaha dan kesempatan kerja yang seluas-luasnya pada sektor-sektor potensial. Seiring dengan peningkatan pendapatan penduduk, pemerintah juga melakukan penataan pelayanan dan perluasan obyek pajak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mempertimbangkan suasana kondusif untuk mendukung berkembangnya investasi di Kalimantan Timur.

Berdasarkan data proyeksi pendapatan dan proyeksi data belanja wajib dan mengikat, dapat disusun kapasitas riil keuangan daerah pada tahun 2017-2018 seperti tabel berikut:

Tabel 3.14
Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2017-2018

No	Uraian	Target	
		APBD TA 2017	Rencana TA. 2018
1	Pendapatan	8,098,900,000,000.00	6,756,670,773,481.00
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	-	-
	Total Penerimaan	8,098,900,000,000.00	6,756,670,773,481.00
	Dikurangi		
4	Belanja Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat	5,216,312,310,945.00	6,532,176,882,984.00
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	2,882,587,689,055.00	224,493,890,497.00

Sumber : data diolah

3.2.2.4 Proyeksi Belanja

Rencana belanja tahun 2018 diarahkan kepada komponen-komponen penyediaan anggaran yang merupakan kewajiban-kewajiban daerah dengan harapan dapat mencapai hasil yang optimal pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah.

Adapun rencana belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 sebesar Rp.6,765,670,773,481,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4,081,781,641,954 dan Belanja Langsung Rp. 2,683,889,131,527,- selanjutnya dapat dilihat tabel 3.19.

Tabel 3.15

Struktur Belanja Tahun 2017 dan Rencana Tahun 2018

NO	URAIAN	APBD TA. 2017	RENCANA TAHUN 2018
1	2	3	4
1	Pendapatan	8,098,900,000,000.00	6,765,670,773,481.00
2	Belanja	8,098,900,000,000.00	6,765,670,773,481.00
21	Belanja Tidak Langsung	5,290,162,945,000.00	4,081,781,641,954.00
	211 Belanja Pegawai	1,961,725,841,770.00	2,008,578,641,954.00
	212 Belanja Subsidi	-	-
	213 Belanja Hibah	865,658,700,000.00	430,750,000,000.00
	214 Belanja Sosial	5,010,000,000.00	5,500,000,000.00
	215 Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota	1,825,627,075,000.00	1,630,400,000,000.00
	216 Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	617,141,328,230.00	1,553,000,000.00
	217 Belanja Tak Terduga	15,000,000,000.00	5,000,000,000.00
22	Belanja Langsung	3,033,372,855,000.00	2,683,889,131,527.00
	121 Belanja Pegawai	273,003,556,950.00	-
	122 Belanja Barang & Jasa	1,274,016,599,100.00	-
	123 Belanja Modal	1,486,352,698,950.00	-
	Surplus / Defisit	-	-

Sumber : data diolah

3.2.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Secara umum, ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam ekstensifikasi untuk memenuhi pencapaian target penerimaan Pendapatan Daerah, meliputi:



1. Pembaharuan ketentuan hukum (Yuridis Formal), mencakup:
 - a. Menjamin kepastian hukum.
 - b. Penyesuaian tarif sesuai perkembangan kehidupan sosial ekonomi.
2. Memberi motivasi kepada masyarakat agar secara sukarela membayar pajak (*tax minded*), mencakup:
 - a. Memberikan bimbingan dan pembinaan kesadaran wajib pajak.
 - b. Meningkatkan pelayanan.
 - c. Menerapkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, dalam rangka pencapaian target penerimaan Pendapatan Daerah tahun 2017, terdapat beberapa kegiatan Intensifikasi yang dilakukan, antara lain:

1. Bidang Pajak Daerah

A. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan kebijakan:

- 1) Membangun Layanan Publik berbasis IT melalui *system online* se-Kalimantan Timur, khususnya pembayaran PKB pada kantor bersama Samsat.
- 2) Menambah kantor samsat pembantu/unit pelayanan pada daerah-daerah yang sulit terjangkau dari kantor induk, terutama di daerah pesisir dan daerah perbatasan.
- 3) Pemberian keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan sanksi administrasi bagi kendaraan bermotor tahun pembuatan 2005 ke bawah.
- 4) Menyediakan sarana mobilitas Samsat Jelajah.
- 5) Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan tarif Progresif sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- 6) Membangun *counter-counter* pelayanan pada mall/pusat perbelanjaan di Balikpapan, Samarinda, dan Bontang, termasuk menyediakan layanan *payment point* dengan menggunakan jasa perbankan (Bank Kalimantan Timur) sampai ke tingkat pedesaan.
- 7) Menyediakan *Speed Boat Delivery Order* yang ditempatkan di Pelabuhan KPLP, Mangkupalas, Harapan baru, dan Sungai Lais, serta penyediaan sepeda motor *Delivery Order* untuk menjangkau wajib pajak di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh roda 4.



- 8) Dispenda sudah berkerja sama dengan Universitas Mulawarman untuk menempatkan mobil Samsat Kampus.
 - 9) Meningkatkan mutu layanan berstandar ISO di seluruh kantor bersama Samsat.
 - 10) Meningkatkan kerja sama dengan Dinas/Instansi terkait dalam rangka mengintensifikasi penerimaan.
 - 11) Melakukan intensifikasi dan pemutakhiran data Kendaraan Bermotor pada PDE Dispenda.
 - 12) Melakukan Kegiatan operasional/razia lapangan pendataan di seluruh Kab/Kota se-Kalimantan Timur.
- B. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan kebijakan:
- 1) Mengintensifikasikan penelitian persyaratan untuk menjaring BBN II terhadap kendaraan yang sudah dipindahtangankan.
 - 2) Melakukan sosialisasi secara berkelanjutan terhadap penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah kepada para dealer dan agen tunggal pemegang merk termasuk badan *leasing*.
 - 3) Melakukan kegiatan penagihan dan pendataan terhadap perusahaan pengguna alat berat/besar yang beroperasi di Kalimantan Timur.
 - 4) Membuat kebijakan pemberian insentif pengurangan BBNKB bagi Wajib Pajak yang bernomor polisi luar daerah Kalimantan Timur untuk memutasikan ke Nomor Polisi Kalimantan Timur dalam bentuk Peraturan Gubernur.
 - 5) Pemberian keringanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor jenis *Dump Truck* yang tidak menggunakan jalan umum.
 - 6) Membangun Layanan Publik berbasis IT melalui sistem online se-Kalimantan Timur, khususnya pembayaran PKB pada kantor bersama Samsat.
 - 7) Meningkatkan kerja sama dengan dinas/instansi terkait dalam rangka mengintensifikasi.



- 8) Melakukan intensifikasi dan pemutakhiran data Kendaraan Bermotor pada PDE Dispenda.
 - 9) Melakukan kegiatan operasional/razia lapangan pendataan diseluruh Kab/Kota se-Kalimantan Timur.
- C. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan kebijakan:
- 1) Memberlakukan tarif tunggal sebesar 7,5 persen secara penuh sesuai Perda Nomor 01 Tahun 2011.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (BPH-Migas, Kemendagri & Kemenkeu) terhadap penyaluran BBM di Kalimantan Timur.
 - 3) Menginstruksikan kepada seluruh penyedia BBM yang beroperasi di Kalimantan Timur wajib untuk memiliki izin wajib pungut (WAPU) yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Timur.
 - 4) Melakukan audit terhadap seluruh penyedia BBM atas penjualan BBM yang membayar PBBKB.
 - 5) Melakukan kegiatan pendataan dan pemberian nomor NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) bagi setiap agen penjualan BBM.
 - 6) Melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan yang berlaku kepada seluruh penyedia BBM secara berkala, termasuk melakukan rekonsiliasi penilaian dan penjualan BBM di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- D. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dengan kebijakan:
- 1) Berkoordinasi dengan pihak Dinas Pertambangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - 2) Melakukan kegiatan operasional terpadu secara berkala setiap triwulan.
 - 3) Mengaktifkan tim intensifikasi pada tingkat Kabupaten/Kota.
- Khusus untuk pajak Air Bawah Tanah pada tahun 2011 kewenangan pemungutan dilakukan oleh Kabupaten/Kota.
2. Bidang Retribusi Daerah, dengan kebijakan:
- A. Merumuskan seluruh kebijakan yang menjadi dasar pungutan.
 - B. Mengadakan monitoring dan bimbingan teknis pungutan dalam setiap penyetoran.

- C. Memberikan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik dalam rangka penertiban pungutan.
- D. Melaksanakan koordinasi dan evaluasi atas pungutan bidang Retribusi Daerah dengan instansi.
- E. Melakukan sosialisasi pungutan Retribusi Daerah secara terpadu dengan instansi terkait.
- F. Memotivasi Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana senantiasa meningkatkan pelayanan yang memberikan kontribusi peningkatan Penerimaan Asli Daerah.

3.2.3.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat, seperti belanja pegawai, menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
2. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Belanja bagi hasil pada kabupaten/kota merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran pendapatan asli daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) dan dana perimbangan (DAU yang telah dikurangi oleh belanja pegawai), sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
4. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan pada program-program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4), operasional perangkat desa dan BPD, RT, RW, dan LPMD.
5. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.
6. Belanja daerah berupa belanja langsung setiap PD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat.
7. Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk

melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Belanja langsung program diutamakan untuk membiayai 75 program prioritas pembangunan Tahun 2017.

8. Mendukung program dan kegiatan strategis yang terkait dengan agenda nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional.

Adapun rencana dan proyeksi struktur belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.16
Rencana Struktur Belanja Daerah Tahun 2017-2018

Uraian		Jumlah	
		APBD TA. 2017	Rencana TA. 2018
1	Pendapatan	8,098,900,000,000.00	6,765,670,773,481.00
2	Belanja	8,098,900,000,000.00	6,765,670,773,481.00
2.1.	Belanja tidak langsung	5,290,162,945,000.00	4,081,781,641,954.00
2.2.	Belanja Langsung	2,808,737,055,000.00	2,683,889,131,527.00
	Surplus / Defisit	-	-

Sumber : data diolah

Belanja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018, meliputi:

1. Meningkatkan wajib belajar 12 tahun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, diprioritaskan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2010, yaitu 10 persen anggaran Kesehatan yang terdiri dari 1/3 (sepertiga) untuk upaya kuratif dan 2/3 (dua per tiga) untuk upaya preventif;
3. Percepatan pengentasan kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian bekerja dan penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin;



4. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja dengan peningkatan kualitas tenaga kerja;
5. Pengembangan ekonomi kerakyatan dengan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, menjaga stabilitas harga dan efisiensi distribusi barang, peningkatan investasi sektor UMKM, memperbaiki tata niaga dan pemasaran produk UMKM dan pengarusutamaan gender serta menjaga ekspektasi masyarakat melalui transparansi harga;
6. Percepatan transformasi ekonomi dengan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global, meningkatkan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global, peningkatan ekspor produk olahan dan pengembangan zonasi kawasan agroindustri hilirisasi sumber daya mineral, gas, dan batu bara;
7. Pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan dengan peningkatan bauran energi baru dan terbarukan dan peningkatan rasio elektrifikasi;
8. Pengembangan Agrobisnis dengan meningkatkan ekspor produk olahan unggulan, konektivitas infrastruktur dasar menuju setra agribisnis, penyediaan SDM pendukung yang berkualitas dan penerapan inovasi teknologi agribisnis;
9. Peningkatan produksi pangan dengan peningkatan areal pertanian melalui cetak sawah dan optimasi lahan, peningkatan infrastruktur pertanian, peningkatan produktivitas pertanian dan penerapan mekanisasi dan teknologi pertanian;
10. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dengan peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi di kawasan Maloy, kawasan industri lainnya dan pusat pertumbuhan serta peningkatan konektivitas antar kawasan industri dan pusat pertumbuhan;
11. Reformasi birokrasi dan layanan publik dengan standarisasi rencana dan prosedur tiga prioritas fokus dan peningkatan kapasitas dan manajemen aparatur; dan
12. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui penurunan emisi gas rumah kaca, pengarusutamaan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah, pemanfaatan lahan-lahan terdegradasi, perbaikan tata kelola dan perijinan pemanfaatan hutan dan lahan, penerapan konsep dan strategi pembangunan

ekonomi (*green economy*) yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas udara dan lingkungan hidup perkotaan, serta penegakan hukum lingkungan.

3.2.3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penerapan anggaran defisit dalam RKPD tahun 2018 sejalan dengan konsep penganggaran berbasis kinerja dengan tujuan untuk mengakomodir lebih banyak kebutuhan publik dan untuk stimulasi ekonomi melalui tambahan belanja infrastruktur dalam APBD. Penentuan besaran pembiayaan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kecenderungan adanya sisa lebih penyerapan anggaran tahun 2017.

Tabel 3.17
Proyeksi Pembiayaan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2017-2018

No	Uraian	Jumlah	
		APBD TA. 2017	Rencana RPJMD Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (silpa)	-	-
2.	Pencairan dana cadangan	-	-
3.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
5.	Penerimaan Kembali Pemberian -Pinjaman	-	-
6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-
1.	Pencairan Dana Cadangan	-	-
2.	Penyertaan modal (investasi) daerah	-	-
3.	Pembayaran pokok utang	-	-
4.	Pemberian pinjaman daerah	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	-	-

Sumber: Data diolah



Guna mempercepat peran pemerintah dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi di daerah, Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya dalam **menggali sumber-sumber pembiayaan yang sesuai dengan potensi daerah yang ada**, demi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Peningkatan belanja daerah tersebut dibutuhkan dalam rangka percepatan pembangunan daerah sehingga diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Alternatif kebijakan lainnya yang saat ini masih di kaji untuk dikembangkan di Kalimantan Timur adalah pelaksanaan program Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau *Public Private Partnership* (PPP) serta pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta dilakukan melalui skema *Public Private Partnership* (PPP) atau selanjutnya disebut sebagai Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dan skema *Corporate Social Responsibility* (CSR). Melihat karakteristik ekonomi Kalimantan Timur sebagai salah satu daerah yang memiliki SDA melimpah serta dengan keberadaan jumlah perusahaan Internasional maupun nasional yang cukup banyak, potensi dana CSR merupakan salah satu poin yang perlu diperhatikan kemanfaatannya dengan terus mendapat dukungan dari semua pihak terkait.